

Imago Dei di Tengah Datakrasi Gerejawi: Model Teologis-Kritis Data-Informed, Spirit-Led Church dalam Tata Kelola Pelayanan

Sri Darajad Suaji

Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia (STTAI)

sdsuaji@gmail.com

Abstract

Digitalization and data-driven decision-making present a new theological challenge for the church. Data can strengthen ministerial accountability, yet it may also become a rival authority when metrics, algorithms, and quantitative indicators determine the meaning of ecclesial success. This article employs a qualitative-descriptive approach with theological-critical analysis of literature on datacracy, datafication, algorithmic governance, metric fixation, digital church practices, and Christian ethics. The study argues that the main issue is not the use of data itself, but the shift of data from a diagnostic tool into a quasi-sovereign authority within ecclesial discernment. This article proposes a data-informed, Spirit-led church model, an ecclesial paradigm that treats data as testimony to be interpreted rather than a verdict to be obeyed. The model emphasizes human dignity as imago Dei, communal discernment, ethical data governance, and accountability before Christ amid metric-driven ministry.

Keywords: datacracy, imago Dei, digital church, data governance, Spirit-led church

Abstrak

Digitalisasi dan pengambilan keputusan berbasis data menghadirkan tantangan teologis baru bagi gereja. Data dapat menolong gereja meningkatkan akuntabilitas pelayanan, tetapi juga berisiko menjadi otoritas tandingan ketika metrik, algoritma, dan indikator kuantitatif menentukan makna keberhasilan gerejawi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis teologis-kritis terhadap literatur tentang datakrasi, datafikasi, tata kelola algoritmik, fiksasi metrik, gereja digital, dan etika Kristen. Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penggunaan data, melainkan pada perubahan fungsi data dari alat diagnostik menjadi otoritas quasi-berdaulat dalam discernment gereja. Artikel ini menawarkan model *data-informed, Spirit-led church*, yaitu paradigma gerejawi yang menempatkan data sebagai kesaksian yang perlu ditafsirkan, bukan sebagai vonis yang harus ditaati. Model ini menegaskan pentingnya martabat manusia sebagai *imago Dei*, discernment komunal, tata kelola data etis, dan akuntabilitas kepada Kristus.

Kata Kunci: datakrasi, imago Dei, gereja digital, tata kelola data, gereja yang dipimpin Roh

Pendahuluan

Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan semakin dipandang sebagai syarat penting bagi keberlangsungan organisasi. Model pengambilan keputusan yang sebelumnya banyak bertumpu pada intuisi, tradisi, pengalaman pemimpin, atau kewenangan hierarkis kini bergerak ke arah *data-driven decision making* (DDDM). Dalam model ini, keputusan diproyeksikan menjadi lebih objektif, efisien, responsif, dan terukur karena ditopang oleh data, indikator, serta sistem analitik digital. Namun di balik janji objektivitas tersebut muncul pertanyaan mendasar: apakah data sungguh hanya menjadi alat bantu, atau perlahan berubah menjadi pusat legitimasi baru dalam menentukan arah hidup bersama?¹

Dalam kajian politik dan hukum, istilah datakrasi mengacu pada situasi ketika kedaulatan rakyat, pertimbangan publik, dan akuntabilitas demokratis berpotensi digeser oleh kedaulatan data. Aspirasi warga tidak lagi dibaca melalui proses representasi dan deliberasi-pertimbangan mendalam, melainkan melalui pola data yang diolah secara algoritmik. Datakrasi menjanjikan keputusan yang cepat dan berbasis fakta, tetapi sekaligus menghadirkan risiko konsentrasi berkuasanya pemilik data, perancang sistem, dan penyedia teknologi. Karena itu, datakrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis, melainkan sebagai masalah legitimasi, otoritas, dan akuntabilitas.²

Dalam konteks Indonesia terlihat bahwa paradigma DDDM semakin mengakar dalam kebijakan publik nampak melalui Satu Data Indonesia, portal data pemerintah daerah, dan tata kelola data sektoral. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menunjukkan upaya negara membangun ekosistem keputusan publik yang lebih terpadu berbasis data. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa penggunaan data tidak dapat dilepaskan dari hak subjek data, keamanan informasi, dan tanggung jawab pengendali data. Kedua regulasi tersebut memperlihatkan ambivalensi yang sama: data diperlukan untuk tata kelola yang lebih baik, tetapi data juga membutuhkan batas etis dan akuntabilitas.^{3,4}

Proses datafikasi, yaitu kecenderungan mengubah berbagai aspek kehidupan menjadi data yang dapat dihitung, dibandingkan, diprediksi, dan dioptimalkan, tidak berhenti pada ranah pemerintahan atau bisnis. Tröhler dan Maricic menunjukkan bahwa kepercayaan modern pada data dan standar terukur memiliki dimensi kepercayaan yang sering tidak disadari. Scherz

¹Muhammad Ardiansyah, "Pengelolaan Program Digitalisasi Pada Sekolah Penggerak (Studi Multi Situs di SDN 73 Sudu dan SDN 132 Malele Kabupaten Enrekang)," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* (2025).

²Widodo Dwi Putro, "Democracy Crisis and the Rise of Datacracy," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 53–75.

³Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia* (2019).

⁴Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (2022).

bahkan memperlihatkan bahwa tata kelola algoritmik dapat membentuk budaya kecemasan karena manusia terus-menerus ditempatkan di bawah bayang-bayang prediksi, risiko, dan skor. Dengan demikian, datafikasi bukan hanya perubahan alat, melainkan perubahan cara manusia memahami diri, keberhasilan, risiko, dan masa depan.^{5,6}

Gereja-gereja di Indonesia tidak berada di luar arus tersebut. Sesudah pandemi Covid-19, banyak gereja mengadopsi *live streaming*, ibadah daring, kanal YouTube, media sosial, database jemaat, aplikasi keuangan, survei digital, dan *dashboard* pelayanan. Lontoh dan Wibowo menunjukkan bahwa Pentakostalisme digital di Indonesia mengubah bentuk ibadah dan komunitas virtual. Ama dan Mujiyono mengkaji *cyber church* sebagai ruang inovasi sekaligus pilihan antara kehadiran fisik dan virtual. Katili menegaskan bahwa penggunaan media sosial gereja didorong oleh kebutuhan menjangkau generasi muda, memperluas jangkauan pelayanan, dan mempertahankan relevansi di ruang digital.^{7,8,9}

Kajian agama digital juga menunjukkan bahwa ruang digital tidak sekadar menjadi kanal komunikasi, melainkan lingkungan kultural yang membentuk praktik beriman, bahasa komunitas, dan otoritas simbolik. Campbell dan Garner menyebut perlunya teologi yang mampu membaca iman dalam budaya jejaring, sedangkan studi-studi agama digital mutakhir menegaskan bahwa metode, teori, dan kategori penelitian agama perlu disesuaikan ketika praktik keagamaan berlangsung melalui platform digital.^{10,11} Perubahan ini sejalan dengan transformasi komunikasi digital yang membentuk ulang batas antara ruang publik, ruang privat, dan identitas komunitas beriman.^{12,13}

⁵Daniel Tröhler and Veronika Maricic, "Data, Trust and Faith: The Unheeded Religious Roots of Modern Education Policy," *Globalisation, Societies and Education* (2021): 138–53.

⁶Paul Scherz, *Tomorrow's Troubles: Risk, Anxiety, and Prudence in an Age of Algorithmic Governance* (Georgetown: Georgetown University Press, 2022).

⁷Frederich O. L. Lontoh and Daniel A. Wibowo, "Digital Pentecostalism in Indonesia: Transformation of Worship and Virtual Community," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2025): 1–10.

⁸Ferdinandus Tamu Ama and Akris Mujiyono, "Cyber Church: Between Innovation and Tradition in Christian Ministry in the Digital Age," *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* (2025): 9–16.

⁹Funixman Katili, "Faith in the Digital Age: Factors Influencing Social Media Use among Indonesian Churches," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2024): 450–61.

¹⁰Heidi A. Campbell and Stephen Garner, *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture* (Grand Rapids: Baker Academic, 2016).

¹¹Lisfa Sentosa Aisyah, Rahmat Hidayatullah, and Muria Khusnun Nisa, "Religion Studies in the Digital Age: Mapping Theories, Methodologies, and Approaches in Digital Religion Studies," *Ilmu Ushuluddin* (2025): 131–55.

¹²Derrick De Kerckhove, "Three Looming Figures of the Digital Transformation," *New Explorations: Studies in Culture & Communication* (2020).

¹³Ana Serrano Tellería, *Between the Public and Private in Mobile Communication* (New York: Routledge, 2017).

Di sinilah problem teologis mulai tampak. Data kehadiran, jumlah *viewer*, *engagement* media sosial, laporan keuangan digital, pertumbuhan kelompok kecil, dan statistik partisipasi dapat membantu gereja membaca kondisi pelayanan secara lebih jujur. Namun data yang sama dapat membentuk logika baru: pelayanan dianggap berhasil ketika angka naik, konten dianggap bernilai ketika viral, dan jemaat dianggap terjangkau ketika tercatat dalam sistem. Gereja lalu berhadapan dengan pertanyaan yang tidak langsung dapat dijawab: bagaimana gereja memakai data tanpa membiarkan data menentukan makna manusia, keberhasilan misi, dan arah *discernment* (kebajikan) rohani?

Meskipun berbagai kajian teologis telah membahas digitalisasi gereja, masih terdapat keterbatasan dalam mengaitkan refleksi teologis dengan realitas praksis gereja secara kritis. Sebagian kajian cenderung melihat teknologi digital sebagai sarana pelayanan yang perlu dimanfaatkan, sementara sebagian lain menekankan risiko moral dan spiritualnya. Artikel ini tidak bermaksud menyelesaikan tarik menarik tersebut dengan jawaban normatif yang terlalu sederhana. Sebaliknya, artikel ini menempatkan datakrasi sebagai problem teologis yang perlu dibaca dalam dialog antara teks Alkitab, tradisi teologi, teori sosial, dan konteks gereja Indonesia masa kini.

Research gap artikel ini dapat dirumuskan dalam tiga tingkat. Pertama, kajian tentang datakrasi lebih banyak berkembang dalam ranah hukum, politik, kebijakan publik, dan tata kelola organisasi, tetapi belum banyak menyentuh organisasi gereja sebagai komunitas iman. Kedua, studi tentang gereja digital di Indonesia telah membahas ibadah daring, *cyber church*, komunitas virtual, dan media sosial gereja, tetapi belum secara eksplisit menggunakan datakrasi sebagai lensa kritis untuk membaca pergeseran otoritas pengambilan keputusan. Ketiga, refleksi teologis tentang teknologi digital masih perlu dipertajam agar tidak berhenti pada pernyataan normatif umum, melainkan berani mempertanyakan bagaimana *imago Dei*, ekleziologi, pneumatologi, dan etika Kristen digugat oleh logika metrik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana datakrasi membentuk ulang cara gereja memahami martabat manusia, otoritas rohani, dan keberhasilan pelayanan; serta bagaimana gereja dapat mengembangkan sikap teologis-kritis terhadap data tanpa menolak manfaat data bagi akuntabilitas pelayanan? Dengan rumusan ini, tujuan artikel adalah mengevaluasi datakrasi gerejawi secara teologis-kritis dan merumuskan model *data-informed*, *Spirit-led church*, yaitu sikap gerejawi yang menempatkan data sebagai kesaksian yang perlu ditafsirkan, bukan sebagai kedaulatan baru yang menggantikan *discernment* gereja.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis teologis-kritis. Data utama penelitian berupa teks Alkitab yang relevan, literatur teologi, dan kajian akademik tentang datakrasi, datafikasi, DDDM, tata kelola algoritmik, fiksasi metrik, tata kelola data, serta praktik gereja digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena artikel tidak

bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, melainkan membangun argumentasi konseptual melalui pembacaan kritis antara teori sosial, realitas gerejawi, dan refleksi teologis.

Tahapan penelitian dilakukan dalam empat langkah. Pertama, penulis menyeleksi literatur nasional dan internasional yang relevan dengan *datacracy*, *datafication*, *algorithmic governance*, *metric fixation*, *data governance*, *digital church*, dan etika teknologi. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, keterkaitan dengan konteks gereja atau organisasi, dan kontribusinya terhadap pertanyaan otoritas, martabat manusia, serta pengambilan keputusan. Kedua, penulis melakukan analisis dokumen untuk mengidentifikasi konsep kunci, argumen utama, dan ketegangan yang muncul dalam relasi antara data dan otoritas. Ketiga, penelitian ini membaca studi-studi tentang gereja digital di Indonesia sebagai bahan ilustratif, bukan sebagai data lapangan primer. Studi tentang Pentakostalisme digital, *cyber church*, penggunaan media sosial gereja, *digital discipleship*, dan pertumbuhan gereja berbasis data dipakai untuk menunjukkan gejala praksis yang mengindikasikan masuknya logika datakrasi ke dalam pelayanan gereja. Keempat, seluruh temuan konseptual tersebut dibaca ulang dalam kerangka *imago Dei*, eklesiologi, pneumatologi, dan etika Kristen.

Batasan penelitian perlu ditegaskan. Artikel ini bukan penelitian empiris lapangan tentang satu gereja tertentu, bukan evaluasi teknis atas aplikasi *church management system*, dan bukan penolakan terhadap penggunaan data dalam pelayanan. Artikel ini juga tidak berpretensi menyusun kebijakan data gereja yang final. Yang dilakukan artikel ini adalah memproblematisasi datakrasi sebagai bentuk kedaulatan baru yang berpotensi menggeser *discernment* gereja, lalu menawarkan kerangka teologis-kritis yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian empiris.

Temuan dan Diskusi

Kajian Teori: Datakrasi, Datafikasi, dan Logika Metrik

Yuval Noah Harari dalam *Homo Deus* menggambarkan pergeseran besar dalam peradaban manusia ketika keputusan manusia semakin ditopang oleh kemampuan algoritma mengenali pola perilaku dan memproyeksikan masa depan. Meskipun pembacaan Harari bersifat luas dan tidak secara khusus berbicara tentang gereja, gagasannya penting untuk memahami perubahan imajinasi sosial: manusia tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai subjek penafsir, tetapi juga sebagai entitas yang dapat dipetakan, diprediksi, dan diarahkan melalui data.¹⁴

Secara konseptual, datakrasi dapat dipahami sebagai tatanan pengambilan keputusan yang menempatkan data dan algoritma sebagai sumber legitimasi dominan. Dalam sistem demokrasi, legitimasi secara formal bersumber pada kedaulatan rakyat, representasi, musyawarah, dan akuntabilitas publik. Dalam datakrasi, pusat legitimasi bergeser ke integrasi data, prediksi algoritmik, dan optimasi indikator real-time. Pergeseran ini tidak selalu

¹⁴Yuval Noah Harari, *Homo Deus* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018).

menghapus struktur lama, tetapi dapat menyempitkan ruang deliberasi karena keputusan dianggap semakin sah ketika didukung oleh data.¹⁵

Di tingkat organisasi, datakrasi hadir melalui DDDM yang tidak dengan sendirinya bermasalah; banyak keputusan memang membutuhkan data yang akurat agar tidak didasarkan pada prasangka atau intuisi semata. Namun literatur tentang data *governance* mengingatkan bahwa data tidak pernah berdiri netral, ia selalu dibentuk oleh cara pengumpulan, kategori yang dipilih, asumsi pengolah, tujuan institusi, dan kepentingan yang melekat pada sistem. Karena itu, persoalan utama bukan sekadar apakah gereja memakai data, melainkan siapa yang menentukan kategori data, bagaimana data dibaca, dan otoritas apa yang diberikan kepada hasil analitik tersebut.¹⁶

Di sinilah Goodhart's law dan kritik terhadap *metric fixation* menjadi penting. Goodhart's law menyatakan bahwa ketika suatu ukuran dijadikan target, ukuran itu berhenti menjadi ukuran yang baik. Muller menyebut kecenderungan ini sebagai tirani metrik: organisasi terjebak pada indikator yang mudah dihitung, lalu mengabaikan tujuan substantif yang sulit diukur. O'Neil juga mengingatkan bahwa model matematis dapat menjadi *weapons of math destruction* ketika digunakan secara luas, tidak transparan, dan tidak dapat digugat oleh pihak yang terdampak.^{17,18}

Dalam konteks pelayanan gereja, fiksasi metrik tidak selalu tampak dalam bentuk yang kasar. Ia dapat muncul melalui pertanyaan yang tampak wajar: berapa jumlah yang hadir, berapa viewers, berapa persen pertumbuhan, konten mana yang paling tinggi engagement-nya, dan program mana yang paling banyak menarik jemaat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sah sebagai alat diagnosis. Akan tetapi, masalah muncul ketika pertanyaan kuantitatif menjadi satu-satunya bahasa evaluasi, sementara pertumbuhan karakter, kesetiaan dalam penderitaan, kualitas pemuridan, keadilan bagi yang terpinggirkan, dan ketaatan pada Kristus sulit masuk ke dashboard.

Gejala Datakrasi Dalam Gereja di Indonesia

Pertama, lembaga riset gerejawi seperti Bilangan Research Center memperlihatkan bagaimana data dapat menolong gereja memahami realitas sosial-keagamaan secara lebih terukur. Wulandari mencatat bahwa data statistik dapat dipakai untuk membaca pertumbuhan gereja, partisipasi ibadah, investasi pelayanan anak, dan tren digital jemaat. Secara positif, pendekatan ini mengoreksi kecenderungan gereja mengambil keputusan hanya berdasarkan

¹⁵Putro, "Democracy Crisis and the Rise of Datacracy," 53–75.

¹⁶Xuejiao Li, Yang Cheng, and Charles Møller, "Data Governance: A Critical Foundation for Data Driven Decision-Making in Operations and Supply Chains," *arXiv preprint arXiv:2409.15137* (2024): 1–31.

¹⁷Jerry Z. Muller, *The Tyranny of Metrics* (Princeton: Princeton University Press, 2018).

¹⁸Cathy O'Neil, *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy* (New York: Crown, 2016).

kesan. Namun pada sisi lain, penggunaan statistik gerejawi dapat membentuk kultur baru bahwa keputusan pelayanan dianggap lebih sah ketika berbasis angka. Di titik ini, yang perlu dikritisi bukan keberadaan riset, melainkan kemungkinan data berubah menjadi sumber legitimasi tunggal.¹⁹

Kedua, transformasi ibadah digital di gereja-gereja Pentakosta menunjukkan bagaimana ruang ibadah kini ikut dibaca melalui metrik platform. Lontoh dan Wibowo memperlihatkan bahwa *live streaming*, ruang obrolan daring, dan komunitas virtual telah mengubah bentuk partisipasi jemaat. Jumlah penonton, durasi tontonan, komentar, emoji, dan pertumbuhan pengikut dapat menolong gereja memahami pola partisipasi. Namun data yang sama dapat menggoda gereja menyesuaikan khotbah, liturgi, dan produksi visual terutama berdasarkan apa yang menarik perhatian algoritma, bukan berdasarkan kedalaman formasi iman.²⁰

Ketiga, fenomena *cyber church* memperlihatkan rekonfigurasi struktur pelayanan. Ama dan Mujiyono menunjukkan bahwa gereja digital menggabungkan inovasi teknologi dengan tradisi pelayanan, tetapi juga memunculkan ketegangan mengenai kehadiran, otoritas, dan komunitas. Dalam model ibadah hybrid, tim media dan teknologi bukan lagi unit pendukung belaka, melainkan aktor strategis yang ikut memengaruhi format ibadah, durasi pesan, waktu tayang, dan gaya komunikasi gereja. Pergeseran ini tidak harus ditolak, tetapi perlu disadari sebagai perubahan epistemik (pengetahuan): pengalaman iman semakin termediasi oleh platform dan dibaca melalui statistik.²¹

Keempat, penggunaan media sosial gereja memperlihatkan tekanan algoritmik yang lebih halus. Katili menemukan bahwa gereja-gereja Indonesia menggunakan media sosial untuk menjangkau generasi muda, memperluas jangkauan, dan mempertahankan relevansi. Namun algoritma platform cenderung mengutamakan konten yang singkat, emosional, visual, dan mudah dibagikan. Akibatnya, komunikasi iman dapat terdorong menjadi potongan-potongan konten yang efektif secara distribusi, tetapi belum tentu memadai untuk pemuridan. Gereja berada dalam ketegangan antara perlu hadir di ruang digital dan bahaya menyesuaikan Injil dengan logika visibilitas.²²

Kelima, studi tentang *digital discipleship* memperlihatkan bahwa relasi iman kini semakin terhubung dengan ekosistem digital. Sampe, Sanderan, dan Sule menunjukkan bahwa konektivitas digital membuka peluang transformasi praktik eklesial di Indonesia. Akan tetapi, ketika spiritualitas mulai dibaca melalui daftar kehadiran, *like*, *share*, komentar, dan interaksi platform, gereja perlu bertanya: apakah yang tercatat digital selalu identik dengan kedalaman

¹⁹Wahyoe Rita Wulandari, "Key Data-Based Church Growth in Indonesia from Evangelical Perspective and Critical Review of Them," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 2, no. 3 (2022): 646–59.

²⁰Lontoh and Wibowo, "Digital Pentecostalism in Indonesia," 1–10.

²¹Ama and Mujiyono, "Cyber Church," 9–16.

²²Katili, "Faith in the Digital Age," 450–61.

spiritual? Pertanyaan ini sengaja dibiarkan terbuka, karena di situlah letak pergulatan teologis yang tidak boleh dipercepat menjadi resep manajerial.²³

Pembahasan

Membaca Datakrasi Gerejawi secara Teologis-Kritis

Imago Dei: Manusia sebagai gambar Allah, Bukan Sekedar Data Point

Doktrin imago Dei menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26–27). Dalam konteks datakrasi, doktrin ini bukan hanya jawaban normatif, melainkan juga problem kritis. Jika manusia adalah gambar Allah, bagaimana gereja harus membaca data jemaat tanpa mengubah pribadi menjadi objek statistik? Jika setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat direduksi, bagaimana gereja memakai dashboard tanpa melupakan mereka yang tidak tampak dalam data digital?

Pertanyaan tersebut penting karena data cenderung menghasilkan data ganda, yaitu representasi digital tentang seseorang. Data kehadiran, data persembahan, data pelayanan, data kelompok kecil, dan data interaksi media sosial dapat menciptakan gambaran tentang jemaat. Namun gambaran itu tidak pernah identik dengan pribadi utuh di hadapan Allah. Seorang lansia yang tidak aktif secara digital, jemaat yang bergumul dalam diam, atau anggota yang tidak meninggalkan jejak *engagement* dapat terlihat “kosong” dalam dashboard, padahal mereka tetap memiliki nilai penuh sebagai gambar Allah.

Di sinilah posisi teologis artikel ini menjadi nampak: gereja boleh menggunakan data untuk membaca kebutuhan pastoral, tetapi gereja tidak boleh menyerahkan penilaian martabat, nilai, dan kedalaman iman jemaat kepada data. Data dapat menjadi saksi parsial tentang realitas pelayanan, tetapi tidak boleh menjadi hakim atas nilai manusia. Dengan kata lain, imago Dei menolak setiap bentuk datakrasi yang memperlakukan manusia sebagai entitas yang seluruhnya dapat dihitung, diprediksi, dan dioptimalkan.

Eklesiologi: Gereja sebagai Tubuh Kristus Ditengah Budaya Platform

Perjanjian Baru menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus (1Kor. 12), umat Allah (1Ptr. 2:9–10), dan keluarga Allah (Ef. 2:19). Metafora-metafora ini menunjukkan bahwa gereja pertama-tama bukanlah organisasi metrik, melainkan komunitas relasional yang hidup dari anugerah, karunia Roh, saling bergantung, dan kesaksian. Namun realitas gereja digital menempatkan metafora tersebut dalam problema baru: gereja tetap tubuh Kristus, tetapi tubuh itu kini hadir juga melalui platform, dipantau melalui statistik, dan dievaluasi melalui indikator.

Masalah ini tidak dapat dijawab dengan menolak semua ukuran kuantitatif. Gereja memang perlu mengetahui siapa yang terlayani, siapa yang terabaikan, dan program mana yang tidak lagi relevan. Tetapi gereja juga perlu mengakui bahwa tubuh Kristus tidak identik dengan grafik pertumbuhan. Anggota tubuh yang “kurang tampak” justru mendapat perhatian khusus

²³Naomi Sampe, Rannu Sanderan, and Berna Sule, “Digital Discipleship in the Age of Connectivity: Insights for Transforming Ecclesiastical Practices in Indonesia,” *Journal of Youth and Theology* (2025): 1–28.

dalam imajinasi Paulus (1Kor. 12:22–25). Karena itu, eklesiologi tubuh Kristus mengoreksi logika platform yang cenderung memuliakan bagian yang paling terlihat, paling aktif, dan paling menarik perhatian.

Pada titik ini, artikel ini mengambil posisi bahwa ukuran keberhasilan gereja harus bersifat teologis sebelum bersifat metrik. Jumlah anggota, keuangan, jangkauan media sosial, dan partisipasi program dapat menjadi indikator sekunder, tetapi tidak dapat menggantikan indikator yang lebih mendasar: kesetiaan kepada Kristus, buah Roh, pemuridan, kasih kepada yang lemah, rekonsiliasi, dan kesaksian sosial. Indikator tersebut memang lebih sulit diukur, tetapi justru kesulitan itu mengingatkan gereja bahwa tidak semua realitas Kerajaan Allah dapat dikonversi menjadi angka.

Pneumatologi: Discernment Rohani dan Batas Prediksi Algoritmik

Kisah Para Rasul 15 memberi contoh penting tentang *discernment* gereja. Keputusan mengenai bangsa-bangsa lain tidak diambil hanya melalui data pengalaman, tidak pula hanya melalui kutipan teks, tetapi melalui kesaksian karya Allah, pembacaan Kitab Suci, perdebatan komunitas, dan pengakuan bahwa keputusan itu berada di bawah pimpinan Roh Kudus: “Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami” (Kis. 15:28). Narasi ini menunjukkan bahwa realitas empiris memiliki tempat dalam *discernment*, tetapi realitas itu harus ditafsirkan dalam terang Firman, komunitas, dan Roh.

Dalam gereja masa kini, data dapat berfungsi seperti kesaksian pengalaman: ia memperlihatkan pola kehadiran, kebutuhan pastoral, keterlibatan jemaat, dan kelompok yang mungkin terabaikan. Namun data tidak sama dengan suara Roh Kudus. Data dapat memperlihatkan apa yang sedang terjadi, tetapi tidak secara otomatis menentukan apa yang harus ditaati. Prediksi algoritmik dapat menolong membaca kecenderungan, tetapi tidak dapat menggantikan keberanian profetis untuk memilih yang benar meskipun tidak populer, tidak efisien, atau tidak menghasilkan engagement tinggi.

Scherz menolong gereja memahami bahwa ketergantungan pada prediksi dapat membentuk kecemasan. Dalam budaya algoritmik, keputusan sering didorong oleh ketakutan terhadap risiko: takut kehilangan jemaat, takut kalah relevan, takut angka turun, takut konten tidak dilihat. Gereja yang hidup dalam kecemasan metrik berpotensi mengubah pelayanan menjadi reaksi terus-menerus terhadap dashboard. Karena itu, pneumatologi bukan sekadar penegasan bahwa Roh Kudus memimpin gereja, melainkan kritik terhadap cara gereja dapat kehilangan kesabaran rohani ketika semua hal harus segera diukur dan dioptimalkan.²⁴

Paradigma *data-informed, Spirit-led church* perlu dipahami dalam pergumulan ini. *Data-informed* berarti gereja tidak anti-data dan tidak menolak akuntabilitas. *Spirit-led* berarti gereja tidak mengizinkan data menjadi roh penggerak utama. Paradigma ini tidak menyelesaikan semua persoalan secara otomatis. Ia justru menuntut disiplin komunal: doa,

²⁴Scherz, *Tomorrow's Troubles*.

pembacaan Kitab Suci, percakapan lintas generasi, pengujian motif, keberpihakan kepada yang tidak terlihat, dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak segera tampak berhasil secara metrik.

Etika Kristen: Tata Kelola Data sebagai Wujud Kasih dan Keadilan

Etika Kristen mengharuskan gereja menempatkan penggunaan data di bawah kasih, keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Prinsip *data governance* dalam literatur manajemen menekankan kualitas data, hak akses, keamanan, akuntabilitas, dan kejelasan tujuan penggunaan data. Dalam gereja, prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan secara teologis: data jemaat bukan sekadar aset organisasi, melainkan informasi tentang pribadi-pribadi yang dipercayakan Allah kepada komunitas iman.²⁵

Pertama, prinsip keadilan menuntut gereja memperhatikan kelompok yang tidak terlihat dalam data digital: lansia, anak-anak, jemaat dengan keterbatasan akses teknologi, kelompok ekonomi lemah, dan mereka yang memilih tidak aktif di platform. Data yang tidak lengkap tidak boleh dipakai untuk membenarkan pengabaian layanan pastoral. Kedua, prinsip transparansi menuntut gereja menjelaskan data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana data itu disimpan. Ketiga, prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pemimpin gereja tetap bertanggung jawab secara moral atas keputusan, meskipun keputusan itu dibantu oleh sistem digital.

Keempat, prinsip moderasi teknologis menolong gereja menghindari pemujaan terselubung kepada efisiensi. Zuboff menunjukkan bahwa kapitalisme pengawasan menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan mentah untuk prediksi dan modifikasi perilaku. Gereja perlu berhati-hati agar tidak mengimpor logika tersebut ke dalam pelayanan: jemaat bukan target engagement, pemuridan bukan *funnel* (corong) digital, dan ibadah bukan produk konten. Teknologi dapat dipakai, tetapi penggunaannya harus tunduk pada misi Allah, bukan pada logika pertumbuhan platform.²⁶

Dengan demikian, tata kelola data gereja bukan hanya urusan teknis atau administratif. Ia adalah praktik spiritual dan etis. Cara gereja mengumpulkan, membaca, menyimpan, dan memakai data memperlihatkan siapa yang sebenarnya dianggap berdaulat: Kristus yang memanggil gereja menjadi tubuh-Nya, atau metrik yang menjanjikan kepastian cepat. Di sini artikel ini memilih posisi teologis yang berisiko: gereja harus berani kehilangan sebagian efisiensi jika itu harus mengorbankan martabat manusia, keadilan pastoral, dan discernment rohani.

²⁵Li, Cheng, and Møller, "Data Governance," 1–31.

²⁶Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019).

Sintesis: Data sebagai Kesaksian, Bukan Kedaulatan

Dari pembacaan di atas, datakrasi gerejawi dapat dirumuskan sebagai kecenderungan ketika data, metrik, dan algoritma tidak lagi hanya membantu gereja membaca realitas, tetapi mulai menentukan makna keberhasilan, prioritas pelayanan, dan legitimasi keputusan. Kecenderungan ini tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terhadap iman. Justru ia sering muncul dalam bahasa yang tampak bertanggung jawab: akuntabilitas, efisiensi, relevansi, pertumbuhan, dan pelayanan yang tepat sasaran.

Karena itu, kritik artikel ini tidak ditujukan pada data sebagai alat, melainkan pada kedaulatan data sebagai cara berpikir. Data perlu ditempatkan sebagai kesaksian parsial: ia menyaksikan sebagian realitas yang perlu didengar, diuji, dan ditafsirkan. Data tidak boleh menjadi vonis final atas martabat jemaat, arah misi, atau kualitas iman. Gereja membutuhkan data, tetapi gereja lebih membutuhkan hikmat; gereja membutuhkan indikator, tetapi gereja lebih membutuhkan kearifan; gereja membutuhkan evaluasi, tetapi gereja lebih membutuhkan ketaatan kepada Kristus.

Dengan demikian, paradigma *data-informed, Spirit-led church* sebaiknya tidak dipahami sebagai semboyan praktis yang langsung menyelesaikan problem. Paradigma ini adalah sikap teologis yang mengakui bahwa gereja yang menolak data dapat jatuh pada subjektivitas dan ketertutupan, namun gereja yang menyerahkan diri pada data dapat jatuh pada reduksi manusia dan distorsi misi. Di antara dua bahaya tersebut, gereja dipanggil untuk hidup dalam kebijaksanaan yang rendah hati, kritis, dan komunal.

Model Normatif: Data Informed, Spirit Led Church

Model normatif yang ditawarkan artikel ini dapat dirumuskan dalam empat prinsip. Pertama, data diperlakukan sebagai kesaksian terbatas tentang realitas pelayanan, bukan sebagai rezim yang memerintah gereja. Kedua, keputusan pelayanan ditempatkan dalam kearifan komunal yang melibatkan firman, doa, pengalaman jemaat, suara kelompok yang kurang terlihat, dan pertimbangan etis. Ketiga, setiap penggunaan data harus tunduk pada martabat manusia sebagai imago Dei, sehingga data tidak boleh dipakai untuk memberi label, mengeksklusi, atau mengendalikan jemaat secara manipulatif. Keempat, tata kelola data gereja harus transparan, aman, akuntabel, dan dapat dikoreksi.

Secara praksis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam beberapa langkah awal. Gereja perlu menyusun pedoman penggunaan data yang mudah dipahami, membentuk tim kecil etik-teknologi yang melibatkan pemimpin rohani dan praktisi digital, membatasi akses data berdasarkan kebutuhan pelayanan, membuat mekanisme persetujuan dan koreksi data, serta menilai program bukan hanya berdasarkan jumlah peserta, melainkan juga kualitas pemuridan, perhatian kepada kelompok rentan, kesetiaan pada misi, dan buah iman. Dengan demikian, data tetap dipakai untuk memperbaiki pelayanan, tetapi tidak dibiarkan menjadi otoritas yang menggantikan hikmat rohani.

Model ini tidak menolak dashboard, laporan statistik, survei digital, atau sistem manajemen gereja. Sebaliknya, model ini menempatkan semua perangkat tersebut dalam posisi yang tepat: sebagai alat pembacaan, bukan sebagai penentu makna. Data dapat menyingkap ketimpangan pelayanan, kelompok yang terabaikan, atau pola partisipasi yang menurun. Namun setelah data berbicara, gereja masih harus bertanya secara teologis: siapa yang terluka, siapa yang tidak terlihat, nilai Kerajaan Allah apa yang sedang dipertaruhkan, dan keputusan apa yang setia kepada Kristus?

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa refleksi teologis atas datakrasi gerejawi tidak dapat dilepaskan dari realitas iman yang kompleks. Data hadir sebagai anugerah sekaligus godaan: anugerah karena dapat membantu gereja melihat kebutuhan yang sebelumnya tersembunyi, tetapi menjadi godaan karena dapat menggantikan proses rohani dengan optimasi angka. Karena itu, persoalan utama bukan apakah gereja boleh memakai data, melainkan bagaimana gereja menjaga agar data tetap berada di bawah kedaulatan Kristus dan pelayanan kasih.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya menghubungkan kajian datakrasi dan gereja digital dengan refleksi teologis tentang imago Dei, eklesiologi, pneumatologi, dan etika Kristen. Artikel ini mempertegas bahwa data gereja harus dipahami sebagai kesaksian yang perlu ditafsirkan, bukan sebagai kedaulatan baru yang harus ditaati. Dengan demikian, artikel ini memberi sumbangan konseptual bagi diskusi tentang teknologi digital gerejawi di Indonesia, khususnya dengan menggeser pembahasan dari sekadar pemanfaatan teknologi menuju kritik atas otoritas yang bekerja di balik metrik.

Secara praksis, gereja-gereja dan sinode di Indonesia perlu menyusun pedoman teologis tentang teknologi dan data yang menegaskan batas penggunaan metrik dalam pelayanan. Gereja juga perlu mengembangkan kebijakan tata kelola data jemaat yang mencakup tujuan pengumpulan data, keamanan, persetujuan, hak akses, dan mekanisme koreksi. Namun pedoman tersebut tidak boleh hanya bersifat administratif. Ia harus lahir dari percakapan teologis yang melibatkan pendeta, majelis, pelayan digital, praktisi teknologi, dan jemaat yang dilayani.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kerangka ini melalui studi empiris atau fenomenologis pada gereja-gereja lokal, sinode, dan komunitas digital Kristen di Indonesia. Pertanyaan yang masih terbuka adalah: bagaimana jemaat memaknai dirinya ketika kehidupan rohaninya semakin terdigitalisasi; bagaimana pemimpin gereja membaca data tanpa dikendalikan kecemasan metrik; dan bagaimana gereja membangun indikator pelayanan yang tidak hanya menghitung pertumbuhan, tetapi juga memelihara kesetiaan, kasih, keadilan, dan kedewasaan iman. Artikel ini tidak menutup semua lobang tersebut, melainkan mengundang gereja untuk menghidupinya secara kritis di hadapan Allah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti sebelumnya yang karya-karyanya menjadi rujukan dalam artikel ini, serta kepada Bp. Dr. Fandi Prasetya Kusuma yang memberi inspirasi akademik dan teologis bagi lahirnya artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Lisfa Sentosa, Rahmat Hidayatullah, and Muria Khusnun Nisa. "Religion Studies in the Digital Age: Mapping Theories, Methodologies, and Approaches in Digital Religion Studies." *Ilmu Ushuluddin* (2025): 131–55.
- Ama, Ferdinandus Tamu, and Akris Mujiyono. "Cyber Church: Between Innovation and Tradition in Christian Ministry in the Digital Age." *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* (2025): 9–16.
- Ardiansyah, Muhammad. "Pengelolaan Program Digitalisasi Pada Sekolah Penggerak (Studi Multi Situs di SDN 73 Sudu dan SDN 132 Malele Kabupaten Enrekang)." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* (2025).
- Campbell, Heidi A., and Stephen Garner. *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture*. Grand Rapids: Baker Academic, 2016.
- De Kerckhove, Derrick. "Three Looming Figures of the Digital Transformation." *New Explorations: Studies in Culture & Communication* (2020).
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Katili, Funixman. "Faith in the Digital Age: Factors Influencing Social Media Use among Indonesian Churches." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2024): 450–61.
- Li, Xuejiao, Yang Cheng, and Charles Møller. "Data Governance: A Critical Foundation for Data Driven Decision-Making in Operations and Supply Chains." *arXiv preprint arXiv:2409.15137* (2024): 1–31.
- Lontoh, Frederich O. L., and Daniel A. Wibowo. "Digital Pentecostalism in Indonesia: Transformation of Worship and Virtual Community." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* (2025): 1–10.
- Muller, Jerry Z. *The Tyranny of Metrics*. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- O'Neil, Cathy. *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown, 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Peraturan Presiden, 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2022.

- Putro, Widodo Dwi. "Democracy Crisis and the Rise of Datacracy." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 53–75.
- Sampe, Naomi, Rannu Sanderan, and Berna Sule. "Digital Discipleship in the Age of Connectivity: Insights for Transforming Ecclesiastical Practices in Indonesia." *Journal of Youth and Theology* (2025): 1–28.
- Scherz, Paul. *Tomorrow's Troubles: Risk, Anxiety, and Prudence in an Age of Algorithmic Governance*. Georgetown: Georgetown University Press, 2022.
- Serrano Tellería, Ana. *Between the Public and Private in Mobile Communication*. New York: Routledge, 2017.
- Tröhler, Daniel, and Veronika Maricic. "Data, Trust and Faith: The Unheeded Religious Roots of Modern Education Policy." *Globalisation, Societies and Education* (2021): 138–53.
- Wulandari, Wahyoe Rita. "Key Data-Based Church Growth in Indonesia from Evangelical Perspective and Critical Review of Them." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 2, no. 3 (2022): 646–59.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.